

Analisis Efektifitas Penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah

Madsani¹, Muhammad As'ad²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ sans6875@gmail.com, ² muhammad.asad@stiami.ac.id

* Correspondence author : Muhammad As'ad

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci

Efektivitas;
Penerbitan SP2D
Pencairan Belanja Daerah.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen penting yang harus dipertimbangkankelengkapan ketentuan penerbitannya untuk memerintahkan pencairan dana dari rekening kas negara ke rekening penerima dalam pencairan belanja daerah namun masih terdapat penolakan SPM hingga tidak dapat di terbitkannya SP2D. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektifitas penerbitan SP2D pada keuangan daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung proses pencairan belanja daerah. Pendekatan penelitian yang penulis suku badan pengelolaan gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerbitan SP2D Pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat belum efektif dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah karena adanya faktor-faktor permasalahan pada proses penerbitan SP2D seperti kesalahan yang di lakukan Bendahara SPKD/UKPD dalam kelengkapan dan ketidaksesuaian dokumen, kelalaian pengawasan pegawai selama proses verifikasi, kurang pahamnya pegawai sesuai dengan aturan SOP dalam penyerahan dokumen dan sumber daya kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan serta sarana teknologi yang masih kurang. Adanya permasalahan ini memberikan dampak yang dapat merugikan pegawai dan menjadi potensi kerugian bagi daerah karena terlambatnya proses pencairan dana belanja daerah sesuai dengan ketentuan waktu yang telah di tentukan.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana keuangan daerah dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan dana publik. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan disiplin, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, efektif, efisien, hemat, transparan, serta dengan tanggung jawab yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesesuaian, dan manfaat bagi masyarakat. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjelaskan pencapaian kinerja keuangan mereka menuntut transparansi yang tinggi. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan daerah, satuan kerja perangkat daerah harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dimana untuk segala kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah yang harus dilakukan secara terstruktur, efisien, dan efektif dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pencairan dana merupakan salah layanan pemerintah daerah yang pelaksanaannya seringkali kurang efektif dan berulang kali diberitakan media bahwa pencairan dana yang terlambat akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan. Bahkan

ada di sejumlah kegiatan daerah yang tidak dilaksanakan karena dana lambat dicairkan. Di akhir tahun kegiatan bertumpuk karena masalah proses pencairan dana lambat diproses. Pencairan dana merupakan proses atau tahapan yang dilaksanakan untuk mencairkan dana dari kas daerah (KASDA) yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPD/UKPD dilingkungan pemerintah untuk mencairkan dana lewat bank. Dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. SP2D satu SPM hanya bisa dibuat untuk satu SP2D dan/atau sebaliknya, dalam melakukan satu pencairan dan pada suatu kegiatan.

Dimulai dari SPM yang diajukan dilihat dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya dan penulisannya. Surat Perintah Membayar (SPM) akan diterbitkan apabila pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia serta didukung dengan kelengkapan dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan proses pencairan dana melalui tahapan: pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D yang diterbitkan tersebut selanjutnya dikirim ke bank untuk mencairkan dana, yang diterima bendahara pengeluaran. Selanjutnya bendahara pengeluaran akan mengeluarkan dana dan diberikan kepada pelaksana kegiatan.

Kondisi tersebut diatas disebabkan karena sering terjadi kesalahan dalam penulisan dokumen pendukung SPM dan belum adanya integrasi dokumen pendukung kedalam Aplikasi. Berdasarkan tugas dan fungsi Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan, yakni melaksanakan pembayaran belanja daerah dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). SP2D merupakan salah satu bukti pencairan dana atas beban APBD, sehingga sangat penting agar proses penerbitan SP2D dilakukan lebih cepat, tepat dan akurat. Namun kenyataannya terdapat ketidak sesuaian antara SPM dengan Dokumen Pendukung seperti halnya Kelengkapan persyaratan penerbitan SP2D, Kesalahan penulisan redaksi pada kelengkapan dokumen, karena dibuat secara manual dan Kesalahan input kegiatan, nominal pada sistem untuk penerbitan SP2D. Tidak dapat dipungkiri sering terjadi penolakan dan pengembalian SPM atas pengajuan pencairan dana yang menyebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak dapat diterbitkan karena banyak kekurangan atau kesalahan dokumen yang menyertai SPM.

Berdasarkan fenomena-fenomena keterlambatan pencairan dana yang berulang, peneliti bermaksud mencari penjelasan empiris tentang efektivitas penerbitan SP2D pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mendukung proses pencairan belanja daerah seperti penyebab kurang efektifnya proses penerbitan SP2D menggunakan kasus nyata yang terjadi. Fokus studi mengkaji pengaruh factor pengawasan, SOP dan kualitas SDM terhadap efektivitas pencairan dana. Maka dari pada itulah agar penelitian secara utuh, komprehensif, dan holistic maka peneliti akan memberikan judul penelitian “Analisis Efektifitas Penerbitan SP2D Pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah”.

KAJIAN TEORI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Angelina, Ghita, 2019:10) “Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan anatara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat. Menurut Ardianto, Hilarius Wahyu (2018: 8) “Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam”.

Jadi analisis disini adalah sebuah kajian yang di teliti guna mendapatkan hasil yang mendalam. Menurut Jogiyanto (Mujati, Hanik dan Sukadi, 2020: 1) “Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi

dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan Komarudin (Angelina, Ghita, 2019:10) mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Konsep efektivitas organisasi yang disajikan dalam buku ini bergantung pada teori sistem namun kami yakin bahwa konsep yang lain, yakni dimensi waktu. Dua kesimpulan utama dari teori sistem adalah (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input-proses-output, bukan hanya output, dan (2) kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya. Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasan pengguna/client.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo-Basuki,2019:24). Metode pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.

Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti analisis efektifitas penerbitan SP2D dalam mendukung proses pencairan belanja daerah Dan fokus penelitian adalah uraian detail penulis terhadap konsep yang akan diteliti yang berisikan ukuran atau parameter dari konsep yang menjadi dasar dalam pedoman wawancara, observasi, dan dokumen yang digunakan. Penelitian ini memfokuskan pada:

1. Objek Penelitian : Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian yang penulis ambil adalah analisis efektifitas penerbitan SP2D dalam mendukung proses pencairan belanja daerah.
2. Subjek Penelitian : Subjek penelitian ditujukan kepada seluruh pegawai suku badan pengelolaan keuangan daerah kota Administrasi Jakarta Pusat yang bertugas dalam penerbitan SP2D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Badan Pengelola keuangan Daerah Kota Administrasi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam setiap proses pencairan belanja daerah. Efektivitas dari penerbitan SP2D merujuk pada sejauh mana proses tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk proses penerbitan SP2D seperti pemenuhan persyaratan administratif, kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku, serta penerbitan SP2D dengan tepat waktu dan akurat serta dampak atau hasil yang di dapatkan dalam setiap kegiatan penerbitan SP2D.

Pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 diketahui bahwa masih terdapat beberapa penerbitan SP2D yang di batalkan. Adanya data ini

menunjukkan bahwa dalam penerbitan SP2D masih di temukan beberapa permasalahan yang akan mempengaruhi efektivitas dalam proses pencairan belanja daerah sebagai berikut :

a. Proses penerbitan SP2D

Mekanisme dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja. Dalam proses penerbitan SP2D di Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk pencairan anggaran belanja daerah belum dapat berjalan sengan baik karena masih ditemukannya beberapa permasalahan yang menyertainya. Dalam proses penerbitan SP2D, Bendahara SPKD/UKPD kepada SBPKD Kota Administrasi Jakarta Pusatsering melakukan kelasahan pada ketidaksesuaian data dengan ketentuan yang berlaku serta tidak lengkap persyaratan yang harus di ajukan. Kurangnya perhatian dari staf pembedaharaan menjadi faktor hambatan yang paling sering terjadi dalam proses penerbitan SP2D.

Dalam proses pengawasan beberapa staf ataupun pegawai baru sering lalai atau kurang teliti dalam memverifikasi pengajuan berkas SPM yang menyebabkan surat pengajuan di kembalikan lagi ke bendahara. Selain itu pemahaman dalam pelaksanaan SOP juga perlu mendapat perhatian dari para pimpinan satuan kerja karena masih terdapat pegawai terutama bendahara SKPD/UKPD yang belum memahami system kerja dalam pekerjaan rutin dan dokumen yang diserahkan sering tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kemudian dari sumber daya diketahui jika sumber daya manusia (pegawai), kemampuan pegawai sudah cukup baik namun masih perlu di tingkatkan terutama bagi pegawai baru pembendaharaan dan sumber daya Sarana prasarana belum di dukung sepenuhnya dengan teknologi informasi yang terintegrasi pada dokumen pencairan secara otomatis sehingga proses pencarian data masih di lakukan secara manual yang cukup memakan waktu dalam proses penerbitan SP2D.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan di ketahui jika hampir secara keseluruhan baik dari proses pelaksanaan, pengawasan, SOP dan sumber daya yang ada masih di temukan beberapa permasalahan dan kekurangan. Adanya temuan hasil penelitian ini dapat disimpulkan jika proses dalam penerbitan SP2D di Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah belum berjalan dengan efektif.

b. Penilaian Dampak

Dalam pengajuan SPM yang di lakukan oleh bendahara sampai dengan penerbitan SP2D banyak ketentuan yang harus disesuaikan dan di verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen penerbitan SP2D. Selama proses penerbitan SP2D ini berlangsung terdapat hasil dimana pengelolaan anggaran yang ada pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam pengeluaran belanja daerah dapat terkoordinir dengan baik dan memiliki bukti data akurat serta dapat di pertanggung jawabkan.

Namun dalam setiap hambatan dari proses penerbitan SP2D menyebabkan terhambatnya proses pencairan dana belanja daerah karena dibatalkannya penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan waktu yang telah di tentukan, tentu saja adanya dampak dari hambatan ini menyebabkan pencairan dana belanja daerah membutuhkan waktu lebih lama dan tertundanya kebutuhan belanja daerah karena adanya revisi dokumen.

Adanya permasalahan ini tentu saja merugikan banyak pihak tidak hanya pegawai namun juga menjadi potensi kerugian bagi daerah. Tidak sesuai jadwal pencairan dana anggaran dengan jadwal di gunakannya anggaran, salahnya penginputan dan penulisan data tersebut akan menimbulkan masalah baru dan berkepanjangan. Adanya permasalahan ini sangat menghambat dan memperlambat proses pencairan dana belanja daerah yang seharusnya sudah mampu di cairkan sesuai dengan ketentuan waktu penjadwalan.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan dapat di simpulkan jika adanya hambatan dalam proses penerbitan SP2D akan mempengaruhi pencairan dana belanja daerah. Dampak yang terjadi dari hambatan tersebut dapat merugikan pegawai maupun menjadi potensi kerugian bagi daerah

karena terlambatnya proses pencairan dana belanja daerah sesuai dengan ketentuan waktu yang di tentukan.

Upaya-upaya yang diusulkan untuk mampu mengatasi hambatan dalam penerbitan SP2D di Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat diantaranya :

1. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi informasi.
2. adanya peningkatan pemahaman kepada bendahara dan verifikator SKPD/UKPD dalam administrasi pengajuan pencairan anggaran melalui seminar-seminar dan pelatihan dalam skala besar agar lebih banyak SDM yang terinformasi dan diberikan sertifikat.
3. pemetaan kebutuhan bendahara pada SKPD/UKPD agar SDM bendahara dapat terpenuhi
4. Pelaksana SBPKD juga perlu meningkatkan kemampuan melakukan penelitian dan selalu update ketentuan yang telah ditetapkan.
5. adanya dukungan teknologi informasi yang terintegrasi secara otomatis dalam pencaira dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM.
6. Perlunya inovasi-inovasi dalam peningkatan efektifitas pengajuan SPM oleh SKPD/UKPD.
7. Penelitian pengajuan SPM oleh pelaksana SBPKD agar dapat ditingkatkan/ selalu update regulasi sehingga lebih akuntabel
8. Perlu tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Bank DKI selaku Bank RKUD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Penerbitan SP2D Pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat belum efektif dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah karena adanya faktor-faktor permasalahan pada proses penerbitan SP2D seperti kesalahan yang di lakukan Bendahara SPKD/UKPD dalam kelengkapan dan ketidaksesuain dokumen, kelalaian pengawasan pegawai selama proses verifikasi, kurang pahamnya pegawai sesuai dengan aturan SOP dalam penyerahan dokumen dan sumber daya kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan serta sarana tekhnologi yang masih kurang. Adanya permasalahan ini memberikan dampak yang dapat merugikan pegawai dan menjadi potensi kerugian bagi daerah karena terlambatnya proses pencairan dana belanja daerah sesuai dengan ketentuan waktu yang telah di tentukan
2. Hambatan yang terjadi pada Penerbitan SP2D Pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Mendukung Proses Pencairan Belanja Daerah disebabkan karena faktor kurangnya kompetensi teknis di kalangan personel terkait, keterbatasan sumber daya sarana prasarana, ketidakmampuan dalam mengadopsi teknologi informasi yang tepat, Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, resistensi terhadap perubahan, kurangnya komunikasi dan koordinasi antarunit, serta kecenderungan untuk mempertahankan praktik-praktik budaya organisasi lama yang tidak efisien.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerbitan SP2D di Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat diantaranya peningkatan kompetensi sumber daya manusia atas pemahaman bendahara dan verifikator SKPD/UKPD melalui seminar-seminar dan pelatihan dalam skala besar ,pemetaan kebutuhan bendahara pada SKPD/UKPD, dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, inovasi-inovasi dalam peningkatan efektifitas pengajuan SPM oleh SKPD/UKPD, peningkatan regulasi oleh pelaksana SBPKD dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Bank DKI selaku Bank RKUD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhidin Sambas, 2018, Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka. Setia, Bandung.
- Angelina, Ghita, (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan. Pembelian Kosmetik Wardah di Kota Makassar.
- Basuki, Sulistyoyo. (2019). Metode Penelitian. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.
- Edy Sutrisno, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam. Pranada Media Group, Jakarta
- Herlina, Jurnal Ipteks Akuntansi, Vol.3 No 1. 2018 Efektivitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember
- Jones, D. A., (2019), “ efectivity Principles and Prevenion of Corrosion”, Macmillan. Publishing Company, New York. Kansara,
- Kettner, P.M., Moroney, R.M dan Martin, L.L. Designing and Managing. Programs:an effectiveness-Based Approach. London: Sage Publication.
- Krisdayanti, Debby, R. Rustam Hidayat, Dwi Atmanto. 2022. Efektivitas. Pengelolaan Piutang Untuk Meningkatkan Laba Perusahaan (Studi Kasus. Pada PT. Nusantara
- Kurnia V. Pasari, Jurnal Administrativus Vol I, No I 2020 Analisis Efektivitas Pencairan Dana Di Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Lexy, J. Maleong. 2019 Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya
- Lubis, A. I. (2017). Akuntansi Keperluan: Akuntansi Multiparadigma (3 ed),. (E.S. Suharsi, & B. Hernalyk, Penyunt.) Jakarta
- Mahmudi. (2020). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: Unit. Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Majid, A. (2023). Strategi Pembelajaran. Bandung: PR Remaja Rosda Karya
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2012. Qualitative Data Analysis. (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Mujiati hanik, (2020) . Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek. Arjowinangun.jogyakarta:sukadi
- Mujiati hanik, (2020) . Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek. Arjowinangun.jogyakarta:sukadi.
- Nolita S. Maraki, Jurnal Ekonomi Manajemen Vol.4 No.3 2019. Efektivitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Dalam Penerbitan Sirat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Di Kabupaten Soron Selatan Provinsi Papua Barat Daya
- Rizky Rahmanda Yogi Saputra, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 No.1 2022 Efektivitas SIMDA FMIS Terhadap Pernerbitan SP2D Pada BPKAD Kabupaten Madiun
- Siagian. Sondang P. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi I. Cetakan. Ketiga Belas. Bumi aksara. Bumi Aksara
- Steers, R. M., Terjesen, S., & Weiss, J. (2018). Organizational Behavior. Houston: OpenStax. BPS. (2020).
- Sudjana, Nana. 2020. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. BANDUNG: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- Wiradi. 2018 Analisis Sosial. Bandung: Yayasan AKATIGA